

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pada praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan pemerintah harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, istilah *Smart City* telah menyebar ke seluruh dunia. *Smart City* adalah rencana untuk mengatasi tantangan yang berkembang di daerah perkotaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup warganya. *Smart City* atau kota

pintar adalah gagasan tentang komunitas yang membantu orang-orang yang tinggal di sana dengan mengelola sumber daya yang tersedia dan efisien dan menyediakan orang / lembaga di dalamnya informasi yang tepat untuk melakukan kegiatan atau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tersebut.

Saat ini banyak daerah yang mulai mengimplementasikan *Smart City* sehingga menimbulkan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah akan dampak positif dari implementasi program *Smart City* untuk meningkatkan kualitas hidup atau kualitas kotanya sendiri. *Smart City* dianggap sebagai solusi potensial untuk masalah yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, seperti masalah polusi, masalah transportasi umum, kesenjangan sosial, masalah ekonomi, dan lain-lain.

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan perkembangan media dan teknologi, Bandung sebagai kota yang besar di Indonesia dan sedang berkembang kini sedang mencari sistem perkotaan yang berkembang dengan baik. Untuk itu, di era digital ini, kapasitas administrasi pemerintah daerah akan meningkat, tanggung jawab langsung terhadap pemerintah daerah sehingga mampu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah membuat konsep manajemen Bandung *Smart City* diseluruh unit/OPD Pemerintah Kota Bandung dikelola dengan baik.

Bandung *Smart City* adalah konsep perkotaan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Bandung. Konsep ini melibatkan penggabungan berbagai tautan dan wilayah di dalam kota untuk

menciptakan pengelolaan yang efisien dan bermanfaat. Dengan menerapkan konsep *Smart City*, Kota Bandung berupaya mengatasi masalah seperti kemacetan, pengumpulan sampah, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, serta memperoleh pengetahuan tentang kondisi geografis daerah setempat untuk menentukan penggunaan lahan yang tepat, baik untuk konstruksi maupun pertanian.

Beberapa masalah yang dihadapi Kota Bandung antara lain kurangnya sumber daya, permukiman kumuh, peningkatan produksi sampah, polusi, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan kondisi fisik kota memburuk jika tidak ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, Bandung *Smart City* hadir sebagai konsep inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola perkotaan dengan lebih baik, serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep *Smart City* tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi berbasis komputer. Konsep *Smart City* melibatkan integrasi teknologi, pemerintahan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan pengembangan berkelanjutan yang holistik untuk mencapai kemajuan perkotaan secara menyeluruh.

Sebelum diterapkannya konsep *Smart City*, Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan dalam hal infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik. Kota ini mengalami kemacetan lalu lintas yang parah, kurangnya parkir yang terorganisir dengan baik, dan aksesibilitas yang terbatas dalam penggunaan pelayanan publik. Namun, dengan adopsi konsep *Smart City*, Kota Bandung telah

mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kota.

Dalam hal transportasi, Kota Bandung mengalami perubahan besar setelah diterapkannya konsep Smart City. Sebelumnya, kota ini sering mengalami kemacetan lalu lintas yang parah dan mobilitas masyarakat terbatas. Namun, dengan adanya konsep Smart City, Kota Bandung menerapkan sistem transportasi massal yang terintegrasi, seperti Bus Rapid Transit (BRT), yang memudahkan aksesibilitas ke berbagai tujuan di kota. Sistem pembayaran yang terintegrasi dan penerapan teknologi dalam pengaturan lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi.

Selain itu, perkembangan infrastruktur juga menjadi salah satu hasil dari penerapan konsep Smart City. Sebelumnya, Kota Bandung menghadapi tantangan dalam pengelolaan parkir yang tidak teratur dan minimnya ruang parkir yang tersedia. Namun, dengan penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE), kota ini berhasil meningkatkan efisiensi parkir dan mengurangi parkir liar yang merusak tata kota. TPE memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menemukan tempat parkir yang tersedia melalui aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pelayanan publik di Kota Bandung juga mengalami perkembangan yang signifikan setelah diterapkannya konsep Smart City. Sebelumnya, aksesibilitas dan kualitas layanan publik terbatas bagi masyarakat. Namun, dengan adopsi teknologi dalam pelayanan publik, pemerintah Kota Bandung meluncurkan berbagai aplikasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi dengan pemerintah. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan publik, mulai dari pengajuan izin usaha, pembayaran

pajak, hingga pengaduan layanan, yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat mobile.

Selain infrastruktur dan pelayanan publik, konsep Smart City juga mendorong perkembangan Kota Bandung dalam hal pengelolaan lingkungan dan energi. Kota ini telah mengadopsi teknologi hijau dan energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sistem pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi membantu mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan, sementara penggunaan energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, perkembangan Kota Bandung setelah diterapkannya konsep Smart City sangatlah signifikan. Kota ini telah berhasil mengatasi beberapa tantangan yang dihadapinya sebelumnya. Perubahan dalam infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemacetan lalu lintas berkurang, mobilitas masyarakat meningkat, aksesibilitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dan lingkungan dijaga dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi hijau.

Meskipun perkembangan ini positif, implementasi konsep Smart City tetap menghadapi tantangan dan perlu terus dikembangkan untuk mencapai potensi penuhnya. Upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, mengoptimalkan pelayanan publik, dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam memajukan Kota Bandung sebagai Smart City yang inovatif dan berkelanjutan.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Indung Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung *Smart City*) Periode 2018-

2023 menyatakan bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2016 memasang 445 mesin parkir, dipasang di 211 ruas jalan di kota Bandung dengan mempekerjakan 700 juru parkir resmi yang berseragam oranye dengan gaji sebesar Rp 1,8 juta perbulan, sebagai inovasi transportasi untuk mendukung keberhasilan kota Bandung sebagai kota yang indah, menciptakan pelayanan publik dan untuk meningkatkan perjalanan serta menghilangkan biaya umum masalah transportasi seperti kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kenaikan pajak umum (PAD) melalui tarif kendaraan. Namun dalam praktiknya selama ini, alat parkir tersebut belum berjalan dengan baik untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, dari target Rp 118 miliar, baru diterima Rp 6 miliar.

Tujuan penggunaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) ini adalah untuk memperbaiki administrasi perparkiran yang sebelumnya terasa kurang tepat dan untuk meminimalkan retribusi parkir liar (Pribawana & Kurniadi, 2018). Selain itu, TPE dipilih untuk menggantikan sistem parkir manual dengan juru parkir yang berperan sebagai penerima retribusi parkir secara tunai. Dengan sistem manual tersebut, retribusi parkir yang bocor mencapai 16 miliar rupiah setiap tahunnya (Amaliya, 2017).

Mesin dari TPE ini bermerek Cale yang berasal dari Swedia. Mekanisme penggunaan TPE tersebut tidaklah sulit. Pertama, pengguna layanan parkir memilih jenis kendaraan yang akan diparkirkannya, seperti truk, bus, mobil, atau sepeda motor. Setelah itu pengguna parkir memasukkan nomor polisi kendaraannya mengikuti petunjuk yang tertera. Selanjutnya, pengguna layanan parkir harus menentukan durasi waktu parkir. Kemudian TPE akan memberikan informasi nominal yang harus dibayar (Solehudin, 2017).

Pembayaran parkir tersebut hanya dapat menggunakan uang elektronik (*electronic money* atau biasa disingkat *e-money*) yang berbentuk kartu. Kartu uang elektronik ini menggunakan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dapat memudahkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan cara tapping atau menempelkan kartu pada alat reader. Kartu uang elektronik dapat diperoleh dari Bank BUMN tertentu yang telah bekerja sama dengan kebijakan TPE dan memiliki produk kartu uang elektronik.

### Gambar 1.1

#### Parkir Meter Pada Program Terminal Parkir Elektronik (TPE)



(Sumber: <https://asset.kompas.com/crops/hYZr12uyLeLfJgsZBCshMDMex5g=/0x0:800x533/750x500/data/photo/2017/04/25/997794045.jpg/> 2017)

Pemerintah Kota Bandung membentuk sebuah program yang tidak terlepas dari teknologi untuk mengatasi masalah parkir yaitu program Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang menggunakan sistem pembayaran non tunai dengan metode pembayaran menggunakan uang elektronik seperti yang sudah disarankan. Ratusan alat parkir meter ini didanai sebesar Rp. 55.585.000.000,00 oleh APBD.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir disebutkan bahwa tarif parkir elektronik dibagi menjadi tiga zona wilayah yaitu zona wilayah pusat, zona wilayah penyangga dan zona wilayah pinggiran. Zona wilayah pusat berlaku tarif parkir sebesar Rp. 3.000,00/ 1 jam dan Rp. 2.000,00/ jam berikutnya untuk kendaraan roda empat, sementara itu untuk kendaraan roda dua berlaku tarif parkir sebesar Rp. 2.000,00/ 1 jam dan Rp. 1.000,00/ jam berikutnya.

Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah alat transportasi di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 1,2 juta unit. Meningkatnya jumlah kendaraan merupakan sumber pendapatan yang baik bagi daerah melalui pengenalan retribusi parkir kendaraan. Namun permasalahannya adalah jumlah alat transportasi yang semakin banyak dan kebutuhan lahan parkir yang luas. Sementara itu, jumlah kendaraan terus bertambah, yang membuat tempat parkir semakin sempit, dan suara bising kendaraan terus meningkat.

Selanjutnya terkait dengan permasalahan parkir di sepanjang jalan umum, melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menerapkan sistem parkir



elektronik. Sistem parkir elektronik adalah sistem mesin parkir otomatis yang digunakan dalam pelayanan parkir secara otomatis hanya dengan menggunakan pembayaran uang elektronik atau *cashless*. Inovasi ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban parkir serta menghilangkan permasalahan yang berkaitan dengan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, polusi dan lain-lain. Masalah berkendara di Kota Bandung tidak hanya terkait dengan lalu lintas, ada juga masyarakat yang tidak disiplin dalam menaati peraturan parkir.

**Tabel 1.1**  
**Data Alat Parkir Meter Di Kota Bandung**

<b>Jumlah Unit</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Lokasi</b>
9	Jl. Leuwi Panjang	5	Jl. Barangsiang
9	Jl. Astana Anyar	4	Jl. Kemuning
5	Jl. Panjagalan	5	Jl. Cipahit
9	Jl. Pagarsih	7	Jl. Taman Pramuka
6	Jl. Kalipah Apo	16	Jl. Cilaki
9	Jl. Cibadak	6	Jl. Hasanuddin
8	Jl. Dalem Kaum	5	Jl. Surya Kencana
22	Jl. Jend. Sudirman	4	Jl. Imam Bonjol
5	Jl. Gardu Jati	5	Jl. Tengku Umar
24	Jl. Jamika	5	Jl. Japati
4	Jl. Dewi Sartika	11	Jl. Cisangkuy
4	Jl. Alkateri	3	Jl. Cimanuk
4	Jl. Gg. Suniaraja	8	Jl. Ciliwung
5	Jl. Sunia Raja	7	Jl. Progo
5	Jl. Rangka Gading	7	Jl. Ambon
6	Jl. Taman Sari	14	Jl. M. Toha
1	Jl. Badak Singa	17	Jl. Lengkong Kecil
7	Jl. Cihampelas	10	Jl. Lengkong Besar
15	Jl. Pajajaran	9	Jl. Karapitan
6	Jl. Sultan Agung	9	Jl. Burangrang
5	Jl. Trunojoyo	6	Jl. Halimun
4	Jl. Bahureksa	4	Jl. Malabar
7	Jl. Sumatra	4	Jl. Talaga Bodas
2	Jl. Lembong	7	Jl. Lodaya
2	Jl. Naripan	6	Jl. Palasari
7	Jl. Vandeventer	34	Jl. A. Yani

17	Jl. Otista	5	Jl. Cianjur
10	Jl. Kebonjati	4	Jl. Gatot Subroto
3	Jl. Jawa	Total	= 445

*Sumber : UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2020*

Sejak diluncurkan pada awal 2017, parkir otomatis belum mencapai target dalam pengelolaannya. Ada banyak permasalahan sehingga Tempat Parkir Elektronik (TPE) belum dapat optimal, berawal dari ketidakstabilan sistem pendukung TPE misalnya, keberadaan TPE masih membutuhkan juru parkir yang bertugas untuk memandu petugas parkir dan akses ke TPE. Belum lagi masyarakat yang gagap teknologi karena kurangnya sosial sosialisasi. Para pengguna lahan parkir masih nyaman membayar parkir secara manual memberikan uang kepada juru parkir dan adapula yang membayar ganda akibat ketidak tahuannya.

Pengembangan kota cerdas atau Smart City merupakan salah satu tujuan utama pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Salah satu inisiatif yang telah diterapkan dalam konteks Smart City adalah penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di berbagai area parkir di kota ini. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat banyak masyarakat yang belum merealisasikan penggunaan TPE dan masih membayar parkir secara manual kepada juru parkir.

Sejak diluncurkan pada awal tahun 2017, TPE belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya adopsi TPE oleh masyarakat. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang digunakan dalam TPE. Kurangnya sosialisasi yang efektif tentang penggunaan alat parkir meter

elektronik ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami cara penggunaannya dan manfaat yang dapat diperoleh.

Pada umumnya, masyarakat cenderung memilih cara yang sudah mereka kenal dan terbiasa dengan cara membayar parkir secara manual ke juru parkir. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat mengenai keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui penggunaan TPE. Selain itu, beberapa masyarakat mungkin juga merasa ragu terhadap keamanan dan kehandalan teknologi yang digunakan dalam TPE. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang teknologi TPE serta manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Selanjutnya, masalah lain yang menjadi kendala dalam penggunaan TPE adalah dasar kebijakan atau regulasi yang belum jelas terkait dengan penggunaan alat parkir meter elektronik ini di Kota Bandung. Kurangnya kejelasan dalam dasar kebijakan mengenai penggunaan TPE menyebabkan penundaan dalam pengimplementasian dan penggunaannya secara luas. Beberapa peraturan dan persyaratan mungkin masih perlu diperbarui atau disesuaikan agar dapat mendukung penggunaan TPE dengan lebih efektif. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, operator parkir, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kebijakan terkait TPE dapat dijalankan dengan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

Di samping faktor sosial dan kebijakan, masalah teknis juga menjadi hambatan dalam penerapan TPE di Kota Bandung. Banyaknya alat parkir meter yang dipasang di kota ini mengalami kerusakan mesin, vandalisme, dan bahkan

dicabut dari tempat parkir. Kerusakan dan tindakan vandalisme ini menyebabkan TPE tidak berfungsi secara optimal, sehingga masyarakat yang ingin menggunakan TPE tidak dapat melakukannya. Selain itu, kurangnya perawatan dan pemeliharaan terhadap alat parkir meter juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang sering terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap TPE untuk memastikan ketersediaan dan fungsionalitas yang optimal.

Melihat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan TPE di Kota Bandung, penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya adopsi TPE oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi, baik dari segi sosial, teknis, maupun kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan adopsi TPE, sehingga konsep Smart City di Kota Bandung dapat terealisasi dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan implementasi TPE di Kota Bandung serta mempercepat tercapainya tujuan Smart City yang diinginkan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menulis Skripsi ini sebagai berikut.

1. Hasil analisis dari penelitian Mami Hajaroh yang berjudul “Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program” yang dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta merupakan bagian dari proses kebijakan merupakan tahap

penting, yakni sebagai tahap penyediaan informasi tentang kebijakan dan program yang berjalan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah para evaluator memerlukan keilmuan evaluasi untuk dapat melakukan kebijakan evaluasi karena evaluasi merupakan satu proses akademis ilmiah yang semestinya mengikuti proses ilmiah. Dalam prakteknya, evaluasi memerlukan teori-teori evaluasi. Teori yang dimaksudkan oleh para theorist identik dengan pendekatan atau model teori yang bersifat preskriptif, bukan tentang teori deskriptif atau empiris. Pohon teori evaluasi sebagai ilmu terapan dibangun oleh tiga akar ilmu yakni *epistemology*, *social inquiry* dan *social accountability* yang membangun tiga cabang ilmu evaluasi. Ketiga cabang ilmu evaluasi meliputi cabang metode (*method*), cabang menilai (*valuing*), dan cabang penggunaan (*use*).

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya. Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan akhir dari proses yang dimulai dari merumuskan, menguji, mengadopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi.

(Hajaroh, 2019)

2. Hasil analisis dari penelitian Muhammad Taufan Qohar yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung” lebih memfokuskan kepada hasil keefektifitasan program Tempat Parkir Elektronik yang ada di Kota Bandung berhasil atau gagal. Penelitian ini dilakukan di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Permasalahan dari penelitian ini ialah belum diketahuinya apakah kebijakan TPE di Kota Bandung ini berhasil atau gagal. Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja output dan kinerja *outcome* kebijakan terminal parkir elektronik di Kota Bandung belum optimal.

Output dari implementasi kebijakan TPE adalah dampak apa saja yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan parkir akibat dari diterapkannya penggunaan TPE. Untuk dapat mengetahui output dari

implementasi kebijakan TPE ini maka dibutuhkan indikator-indikator policy output yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks implementasi kebijakan TPE, penulis menggunakan indikator akses, cakupan, frekuensi, dan akuntabilitas.

Implementasi kebijakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) berdasarkan uraian di atas, indikator kinerja output dan kinerja outcome dapat dikatakan belum optimal. Indikator akses telah dikatakan baik namun dibutuhkan peningkatan seperti ketersediaan kartu uang elektronik dan layanan penambahan saldo agar memudahkan pengguna layanan parkir dalam menggunakan TPE. Indikator cakupan (coverage) menunjukkan bahwa cakupan implementasi kebijakan TPE belum optimal. Hal ini terlihat dari sangat minimnya pengguna sepeda motor (yang merupakan kendaraan dengan jumlah terbanyak dan memiliki potensi retribusi parkir yang sangat besar) yang menggunakan TPE.

(Qohar, 2018)

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Diki Suherman di Universitas Padjajaran yang berjudul “Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung” yang memfokuskan kepada konsep evaluasi dampak kebijakan TPE yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Permasalahan dari penelitian ini adalah penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari smart city belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari berbagai aspek baik dari penggunaan mesin parkir, sistem pembayaran yang masih ada yang manual, target peningkatan retribusi parkir yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Bandung. Adapun hasil dan rekomendasi dari penelitian ini diantaranya : 1) sosialisasi yang maksimal yang tidak hanya melalui acara incidental tapi harus continueitas; 2) dibutuhkan rekrutmen yang baik untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten; 3) diperhatikan aspek-aspek lain melalui forecasting dan Planing yang baik untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menjadi kendala tidak terjadi peningkatan retribusi daerah.

(Padjajaran et al., 2020)

4. Hasil analisis penelitian oleh Syifa Nurul Aini dan Ernady Saody yang berjudul “Evaluasi Tingkat Pelaksanaan Konsep *Smart City* Di Kota Bandung” yang penelitiannya dilakukan di Universitas Islam Bandung masih perlu ditingkatkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan indikator internasional yang dikemukakan oleh Rudolf Griffinger dan Boyd Cohen yang terdiri dari 6 elemen untuk pembangunan dan pengelolaan kota menggunakan konsep *Smart City* memiliki enam indikator utama untuk mendukung terciptanya konsep *Smart City* di Kota Bandung yaitu (1) *Smart Economy*; (2) *Smart Mobility*; (3) *Smart Environment*; (4) *Smart People*; (5) *Smart Living*; dan (6) *Smart Government*.

Indikator yang menjadi dasar utama untuk sebuah kota yang cerdas dilihat dari sumber daya manusia yang cerdas (*smart people*), dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur dari mobilitas, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan yang juga cerdas sehingga terciptanya kualitas hidup yang cerdas (*smart living*) bagi masyarakat kotanya. Permasalahan penelitian ini ialah permasalahan kelangkaan sumber daya, adanya permukiman kumuh,



meningkatnya produksi limbah, polusi, kemacetan lalu lintas, dan degradasi lingkungan merupakan beberapa masalah yang akan ditimbulkan seiring dengan menurunnya kondisi fisik kota akibat membludaknya jumlah penduduk di Kota Bandung. Hasil tingkat pelaksanaan konsep Smart City berdasarkan penilaian dari masyarakat Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Indikator Smart Environment Kota Bandung sudah mencapai 55%, indikator Smart Mobility mencapai 43%, indikator Smart Government mencapai 61%, indikator Smart Economy mencapai 53%, indikator Smart People mencapai 67%, dan indikator Smart Living mencapai 58%. Indikator yang menjadi dasar utama untuk sebuah kota yang cerdas dilihat dari sumber daya manusia yang cerdas (smart people), dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur dari mobilitas, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan yang juga cerdas sehingga terciptanya kualitas hidup yang cerdas (smart living) bagi masyarakat kotanya.

(Nurul Aini & Syaodih, 2019)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah, dkk. yang dilakukan di Unismuh Makassar dengan judul “Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Makassar” bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Penerapan Inovasi Sistem Terminal Parkir Elektronik Dilihat Dari Atribut Inovasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang penerapan inovasi sistem terminal parkir elektronik (TPE) di Kota Makassar. Pelayanan publik memandang publik sebagai target pelayanan sehingga diharapkan mampu memberikan dedikasi terbaik dalam melayani publik yang lebih edukatif, dan

selektif serta mengelola kebijakan publik yang dijalankan oleh birokrasi publik, oleh karenanya reformasi publik menghajatkan peningkatan kinerja diantaranya pelayanan publik, melalui berbagai cara (berinovasi) dengan tujuan akuntabilitas efektifitas dan efisien. penerepan inovasi sistem terminal parkir elektronik (TPE) merujuk pada 5 indikator yaitu : (1) Keuntungan Relatif, di dalam penerapan inovasi TPE dengan adanya alat tersebut pembayaran yang dilakukan sudah terkontrol sehingga tidak adanya pungli yang dilakukan oleh jukir atau daeng parkir, alat yang lebih modern dan membuat masyarakat lebih aman memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah di sediakan oleh PD Parkir Makassar Raya. (2) Kesusaian, di dalam penerapan inovasi TPE yang dilakaukan untuk bisa menyesuaikan parkir yang dulu konfensional menjadi parkir elektronik yang memakai alat, perparkiran konfensional hanya ada daeng parkir atau juru parkir tapi dengan adanya alat TPE maka juru parkir akan di awasi oleh pegawai dari PT KTI dan masyarakat juga bisat menyesuaikan perparkiran yang telah ditentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. (3) Kerumitan, adapun yang menjadi kerumitan dalam penerapan inovasi TPE ini yaitu masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan menggunakan alat ini karena harga perjam untuk parkir terlalu mahal untuk mereka yang hanya sebentar parkir di tempat yang ada alat TPE yang telah di tentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. (4) Kemungkinan dicoba, uji coba yang dilakukan selama dua minggu dengan menggunakan perparkiran alat TPE sebelum diresmikan oleh Pemerintah Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya, masyarakat merasa aman parkir lagi di bahu jalan tidak merasa takut di

gembok kendaraannya karena dengan adanya alat TPE ini yang dipasang di bahu jalan maka menjadi perparkiran yang resmi bukan parkir liar lagi. (5) Kemudahan diamati, setelah dengan adanya alat TPE maka masyarakat masih ada juga yang komplain atau tidak setuju, karena sebuah inovasi atau alat baru maka tidak semua masyarakat bisa menerima dengan langsung adanya perparkiran berbasis alat TPE sehingga yang membuat inovasi ini belum berjalan maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. Parkir Makassar Raya telah melaksanakan penerapan program Sistem Terminal Parkir (TPE) di Kota Makassar tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang kurang setuju dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) ke masyarakat.

(Jumaisa et al., 2020)

Kota Bandung selalu membuat kontrol cerdas ciptakan sesuatu yang baru dalam membangun *Smart Government* sehingga memberikan inovasi dan ide baru untuk melayani masyarakat publik serta memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi masa kini. Adanya konsep *Smart City* di Kota Bandung menarik untuk dikaji mengenai evaluasi kebijakan *Smart City* di Kota Bandung terutama pada indikator *smart mobility* yang bertujuan untuk menertibkan mobilitas kendaraan yang ada di Kota Bandung baik dari segi perparkiran, lalu lintas dan lain sebagainya.

Penelitian mengenai terminal parkir elektronik di Kota Bandung dalam sebuah evaluasi kebijakan *smart city* belum pernah dilakukan. Langkah yang diambil Pemerintah Kota Bandung dengan menerapkan TPE sebagai upaya

meningkatkan retribusi parkir merupakan sebuah bentuk kebijakan. Sehingga memaksa stakeholders untuk melaksanakan kebijakan tersebut, terutama masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Implementasi kebijakan TPE ini menarik, mengingat keterkaitannya dengan capaian retribusi parkir. Penelitian tentang evaluasi kebijakan ini akan mengisi kekosongan penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan TPE di Kota Bandung.

Permasalahan yang menjadi penting dalam penelitian ini terkait dengan TPE yang mengalami kerusakan, vandalisme dan beberapa ada yang dicabut menjadi poin utama yang harus diteliti tentang pengevaluasian kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengelolah *smart parking system* sebagai bagian dari *smart mobility* dalam konsep *Bandung Smart City*.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas dan melakukan riset tentang evaluasi kebijakan publik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian dengan judul : “Evaluasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Bandung (Studi Kasus Alat Parkir Meter Pada Terminal Parkir Elektronik”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan konsep *Smart City* studi kasus tentang alat Parkir Meter pada Terminal Parkir Elektronik berdasarkan aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan?

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan konsep *Smart City* studi kasus tentang alat Parkir Meter pada Terminal Parkir Elektronik.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas keberhasilan pada kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
2. Untuk memahami efisiensi pada indikator *Smart Mobility* pada kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
3. Untuk menerapkan kecukupan pada kebijakan *Smart City* pada program terminal parkir elektronik (TPE) di Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis pemerataan pada kebijakan *Smart City* pada program terminal parkir elektronik (TPE) di Kota Bandung.
5. Untuk menyintesis responsivitas dalam menjalankan kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).
6. Untuk mengevaluasi ketepatan kebijakan selanjutnya dari Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kebijakan *Smart City* di Kota Bandung tentang terminal parkir elektronik (TPE).

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Guna Teoritis
  - a. Bagi peneliti agar dapat bermanfaat dan terus melakukan penelitian yang lain mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar ruang lingkup Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai contoh acuan untuk penelitian Ilmu Pemerintahan selanjutnya agar lebih baik.
  - b. Bagi kajian Ilmu Pemerintahan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan pembelajaran maupun penelitian lanjutan yang relevan terhadap bidang yang di bahas dalam Ilmu Pemerintahan.
2. Guna Praktis
  - a. Bagi peneliti diharapkan agar dapat memperluas pengetahuannya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
  - b. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan pembelajaran maupun penelitian lanjutan yang relevan terhadap bidang yang di bahas.
  - c. Bagi Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pengevaluasi kebijakan agar dapat lebih menjalankan kebijakan lebih efisien.
  - d. Bagi seluruh masyarakat Kota Bandung baik penduduk asli maupun pendatang agar mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan *smart city* di

Kota Bandung tentang Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan menjadi sumber informasi saling berbagi pengetahuan bagi masyarakat lain yang masih awam.